

PENTINGNYA KARAKTER WARGA NEGARA DEMOKRATIS DI ERA DIGITAL

Maya Mustika Kartika Sari

PPnK, FISH, Universitas Negeri Surabaya, mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Perkembangan pendidikan tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil evolusi teknologi ini (terutama informasi) adalah digitalisasi. Era digital telah mengubah tatanan kehidupan sosial yang oleh Clayton Christensen disebut sebagai era gangguan. Fakta ini juga didukung oleh semangat kebebasan dan demokratisasi di berbagai bidang kehidupan. Ini berdampak pada sektor pendidikan, terutama dalam penanaman nilai-nilai moral dan pembangunan karakter nasional. Upaya serius dan terencana diperlukan untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapinya. Satu karakter yang perlu diperkuat adalah karakter demokratis. Ada empat nilai utama dalam karakter demokrasi, yaitu kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, dan kepedulian. Artikel ini bermaksud untuk menguraikan masalah dalam kerangka penguatan negara-bangsa di era yang menafikan batas-batas fisik, politik, dan sosial budaya. ..

Kata Kunci: negara-bangsa, demokrasi

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah tatanan kehidupan sosial yang oleh Clayton Christensen disebut sebagai era gangguan. Digitalisasi mampu mereduksi batas-batas ruang dan waktu dalam proses dan integrasi sosial. Penggunaan internet dan media sosial, secara masif mereduksi hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam komunikasi sosial. Saat ini, setiap orang dapat setiap saat melakukan komunikasi dengan sangat segera bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Seseorang bisa saja mendapat perintah dari bosnya di malam hari karena adanya whatsapp. Seorang anak bisa saja tidak merasa sendiri ketika dihukum orang tua di dalam kamar karena tetap bisa berkomunikasi via medsos.

Euforia revolusi teknologi secara gradual mendorong perubahan dalam struktur masyarakat. Hal yang paling mendasar dari perubahan sosial yang terjadi adalah “meluasnya” arena pergaulan manusia, yaitu dari arena riil (nyata) yaitu lingkungan fisik manusia, berkembang ke arena virtual media sosial yang tercipta akibat perkembangan teknologi. Hal tersebut mendorong berkembangnya pluralitas dan segmentasi menjadi hal yang tidak terelakkan dalam realitas relasi kolektif. Munculnya berbagai macam komunitas dunia maya berdampak pada suasana integrasi dalam konteks negara-bangsa.

Konsep negara-bangsa yang selama ini didominasi fakta-fakta sosial nyata, doktrinasi dan mengikat warga negara baik secara fisik dan psikis dalam kerangka kepatuhan mutlak dalam organisasi politik, telah

mengalami perubahan mendasar. Revolusi teknologi menghasilkan ruang-ruang baru dalam konteks yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jika dalam konteks negara bangsa dikenal konsepsi *citizen* (warga negara) dalam kerangka era digital saat ini muncul istilah *netizen* (warga internet). Disparitas ini memberikan dampak pada jangkauan kedaulatan negara dalam melakukan pengaturan terhadap warga negara. Sekitar awal abad 20, Francis Fukuyama (2004:76) pernah meramalkan akan hilangnya eksistensi negara dikarenakan munculnya komunitas-komunitas anarkhi (mampu mengurus diri sendiri) yang disebabkan meluasnya jaringan kerja melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepertinya hal tersebut similar dengan dengan situasi saat ini.

Faktanya, peran negara di era digital ini banyak terganggu dengan masifnya informasi-informasi yang berasal dari organisasi non negara yang intens melakukan relasi dengan warga negara. Pada akhirnya wujud kesadaran bersama tidak muncul sebagai suatu yang tunggal. Institusi-institusi negara tidak mampu menjangkau ruang-ruang virtual yang semakin menjadi arena ganda bagi warga negara dalam memaksimalkan kemandirian dan kematangan.

Perkembangan masyarakat secara umum memiliki dampak yang besar pada masalah-masalah politik, ekonomi, maupun sosial. Lee dan Newby, dalam Haralambos (2000) mengidentifikasi empat perubahan yang dapat terjadi dalam kerangka fisik (materiil) dan non fisik (non materiil), yaitu :

1. Industrialisme. Perubahan pola pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan inovatif. Industrialisasi merupakan titik awal perkembangan yang mengarah pada penciptaan manufaktur dan *high technology*.
2. Kapitalisme. Perkawinan antara para penemu intelektual dan para feodal, telah menghasilkan munculnya para kapitalis, yaitu orang yang mendapatkan keuntungan sebagai pemilik modal. Kaum pebisnis melalui kegiatan-kegiatan produksi dan ekspansi usaha yang berorientasi industri, menciptakan situasi kapitalistik adalah realitas yang tidak terelakkan dari kehidupan sosial. Hal tersebut telah merubah budaya kolektivitas menjadi budaya individualistik.
3. Urbanisme. Industrialisasi dan kapitalisme secara gradual dan masif menciptakan dinamika mobilitas penduduk yang mengarah pada daerah-daerah industri dan industrialisasi yang menyebar memunculkan mobilitas silang.
4. Demokrasi Liberal. Individualisme berkembang seiring dengan perkembangan Hak-hak individu menjadi isu dan perdebatan utama dalam relasi sosial di seluruh bidang kehidupan. Pengakuan akan hak individu terintegrasi dalam pengakuan politik dan hukum, sehingga sistem negara berkembang menjadi lebih terbuka, bebas dan demokratis, meninggalkan sistem monarki yang sebelumnya banyak dianut.

Perubahan tersebut berdampak pada pola relasi dunia. Fukuyama mengatakan bahwa desakan ekonomi global meruntuhkan pemerintah otoriter dan diganti sistem demokrasi. Demokratisasi menjadi fenomena yang tidak terelakkan. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi negara dengan kultur otoritarian. Nilai-nilai demokrasi belum menjadi acuan warga negara, namun praktik kekuasaan demokrasi dalam negara merupakan tuntutan politik dan ekonomi global.

Situasi ini memunculkan ketimpangan peradaban, hingga Samuel Huntington memprediksikan sebuah benturan peradaban. Era kekacauan besar yang dasar konfliknya bukan lagi pada ideologi atau ekonomi tapi “peradaban” (civilizational). Peradaban yang terjadi saat ini tidak lagi dibangun dalam kerangka realitas namun dilakukan juga melalui cara-cara virtual. Digitalisasi dalam konteks revolusi industri telah menciptakan peradaban baru yang berbasis pada nilai-nilai individualitas yang dijadikan pijakan dalam melakukan tindakan-tindakan kolektif. Nilai-nilai bersama bersifat segmentasi dalam kerangka disparitas yang ekstrim.

Dalam konteks negara bangsa, hal tersebut memunculkan anarkhisme atau paham yang berorientasi pada penyelesaian masalah sendiri tanpa berkaitan dengan

pihak lain. Artinya perbedaan kepentingan tidak dipandang sebagai situasi yang perlu disatukan dalam ruang negara bangsa, Negara bisa saja siap pada perbedaan kepentingan dan kesenjangan sosial, tetapi akan menjadi masalah yang rumit ketika berasosiasi dengan karakteristik budaya. Hal tersebut lambat laun melemahkan eksistensi negara. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menciptakan iklim demokrasi dengan tetap berpegang pada konsepsi kebangsaan? Lebih khusus lagi, Bagaimana mendorong penguatan karakter demokratis warga negara dalam merespon dampak revolusi industri dalam kehidupan kebangsaan Indonesia?

PEMBAHASAN

Masyarakat negara atau dalam konteks politik dikenal sebagai masyarakat sipil (*civil society*) diartikan sebagai arena persahabatan, klub, kelompok keagamaan, asosiasi bisnis, serikat dan asosiasi sukarela lain yang memediasi bidang yang luas dari kehidupan sosial antara rumah tangga dan negara. Lingkungan asosiasi ini dipandang sebagai tempat warganegara mempelajari kebiasaan pertemuan, dialog dan inisiatif sosial yang bebas. Jika dilakukan dengan benar, masyarakat sipil juga bisa membantu menghasilkan perimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang penting untuk demokrasi. .

Dalam merefleksikan prospek keadaban yang tercipta dalam dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan proses dan problem yang unik. Proses dan problem pluralitas adalah fakta yang muncul dalam situasi perubahan masyarakat negara. Hal tersebut perlu direspon secara spesifik dalam mengembangkan hubungan kenegaraan yang berorientasi pada kebaikan bersama. Di era digital, praktik interaksi asosiatif warga negara berada dalam ruang virtual dapat mengaburkan identitas nation-state karena dalam ruang virtual tidak dikenal citizen melainkan netizen. Konsep netizen menafikan batas-batas negara.

Keadaban Demokratis

John Keane, memfokuskan kajian tentang masyarakat sipil sebagai situasi yang membangkitkan citra kebebasan berbicara dan berkumpul tanpa rasa takut. Tindakan warga negara tidak bersifat tersembunyi melainkan merupakan tindakan yang dilaksanakan dengan sepengetahuan negara. Hal tersebut menggambarkan keadaban demokratis yang terbangun dari keterbukaan informasi yang merepresentasikan struktur sosial yang tidak ketat. Max Webber dan Ernest Gellner, dalam *Power and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise*



of the West, menjelaskan bahwa hal mendorong kemajuan Eropa Barat adalah masyarakat yang mampu mengatur dirinya bebas dari campur tangan negara (*societal self-organization*). .

Disini terdapat pelajaran penting mengenai masyarakat sipil dan negara. Betapapun besarnya godaan untuk melarikan diri dari publik demi kesenangan privat, kebebasan sipil sangat tergantung pada negara sipil. Dalam hal ini, dan berlawanan dengan beberapa karakterisasi pembuatan slogan, tidak oposisi zero-sum antara masyarakat sipil dan negara. Sebaliknya, masyarakat sipil membutuhkan negara yang kuat dan membatasi diri. Negara harus membatasi diri dalam hal tidak memonopoli kekuatan masyarakat, memberikan semua personel, pelayanan dan perusahaan yang vital untuk masyarakat itu sendiri. Negara sipil juga harus kuat dalam hal mampu mengamankan kebebasan berkumpul dan berinisiatif dimana kehidupan publik menggantungkan diri. Itu merupakan kebenaran yang dangkal tapi penting, berbeda dengan bayangan kaum libertarian tertentu, kebebasan ini bukan “bebas” dalam hal kebebasan itu merupakan hasil spontan asosiasi manusia independen. Sejarah Afghanistan dan Rwanda menunjukkan betapa menyakitkan kalau negara yang lemah dan lumpuh malah mengundang jagal factionalis bukannya menjadi sumber kebebasan. Masyarakat sipil memerlukan negara sipil karena kehidupan publik dapat terancam oleh kekuatan masyarakat dan juga oleh kekuatan negara.

Keadaban demokratis hanya bisa dibayangkan dalam horizon negara modern yang berfungsi secara efektif. Negara-negara pra-modern mungkin mampu menampung ledakan kekuatan, tapi mereka kekurangan infrastruktur yang seragam dan pemerintahan yang adil dalam bidang-bidang mereka. Dari tempat modern kita yang menguntungkan, itu seharusnya tidak mengherankan. Lagipula dalam demokrasi modern sekalipun, kemampuan negara untuk menjamin hak-hak sipil untuk semua warganegara seringkali hanya parsial.

Karakter Demokratis

Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi yang bertanggung jawab. Dalam kerangka mendorong partisipasi diperlukan pengayaan konteks situasi demokrasi yang dikembangkan dengan nilai-nilai demokratis. Negara-negara Eropa Barat dapat lebih beradaptasi terhadap perkembangan revolusi industri, dikarenakan telah mengembangkan nilai-nilai demokratis sebagai acuan dan moral dasar dalam berkehidupan.

Karakter demokratis telah tercetak dalam watak individu. Sehingga dalam kehidupan bernegara di era digital ini, adopsi karakter demokrasi adalah merupakan modalitas dalam beradaptasi dalam perkembangan relasi negara dan warga negara yang senantiasa mengalami disruptsi.

Penguatan civilitas perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai problema yang muncul dalam hubungan negara-dan warganya. Dinamika digitalisasi kehidupan sosial dan ekonomi memberikan andil dalam lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan menciptakan sikap anarkhi terhadap kepentingan negara. Aspek kebebasan dalam konteks demokrasi perlu diarahkan dalam wujud nilai bersama yang secara masif disepakati dan dilaksanakan secara konsisten. Upaya tersebut dapat diinisiasi oleh negara melalui sub sistem pendidikan. Hal yang perlu dilakukan adalah menyemaikan nilai demokratis sebagai bagian yang integralistik dengan nilai kehidupan lainnya. Hal tersebut meliputi : (1) kejujuran sejati, (2) tanggung jawab sosial, (3) kemandirian yang terhormat, dan (4) hasrat kepedulian,

Kejujuran sejati adalah esensi refleksi diri dalam melakukan empati dan simpati. Kejujuran tidak hanya dipandang sebagai norma sikap konkrit namun juga imajinatif, “jika saya menjadi...”. Diskursus diri dan lingkungan secara jujur menjadi tolok ukur nilai kejujuran dalam karakter demokratis.

Tanggung jawab sosial digambarkan sebagai pemikiran dan sikap yang senantiasa menempatkan diri dalam situasi atau kompleksitas lingkungan sosial yang melingkupi. Sehingga tanggung jawab tidak hanya bersifat individual namun sekaligus kolektif. Hal tersebut mendorong munculnya kehendak untuk melakukan kontrol terhadap diri maupun lingkungannya. Hal tersebut yang membedakan makna tanggung jawab dalam karakter demokratis.

Kemandirian dalam kerangka demokrasi bukanlah sikap dapat mengurus dirinya sendiri dengan baik saja, namun kemampuan dalam menempatkan diri sebagai hal yang berharga bagi lingkungan sekitarnya. Hal tersebut menjadikan individu dengan karakter demokratis bukan saja tidak merepotkan orang lain namun sekaligus senantiasa memberikan akses positif bagi lingkungannya. Hal tersebut merupakan nilai utama dalam karakter demokratis karena menggambarkan kemandirian dengan keterbukaan.

Adapun nilai terakhir dari karakter demokratis adalah hasrat untuk peduli sesama sebagai kebutuhan dasar dari partisipasi dalam masyarakat. Hasrat peduli inilah yang

akan menumbuhkan pemimpin-pemimpin demokratis dengan kebijaksanaan sosial (*social wisdom*).

PENUTUP

Simpulan

Keadaban demokrasi merupakan gambaran utama dalam masyarakat industri. Perubahan dan pengalaman negara dan bangsa lain, merefleksikan realitas fakta dan nilai yang menjadi acuan dominan dalam mengembangkan karakter-karakter dasar dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus menerus dan cepat. Adalah kepentingan negara dan warga negara, dalam memperjuangkan hakikat negara sebagai kehormatan. Untuk itu, karakter demokratis perlu dikembangkan dalam upaya mewujudkan kehidupan politik manusia yang kompatibel atau yang berkesesuaian dengan preferensi ekonomi dan perkembangan Ipteks. Karakter utama itu adalah jujur yang sejati, tanggung jawab sosial, kemandirian yang terhormat, dan hasrat kepedulian. Karakter tersebut merupakan kunci utama dalam merespon setiap perkembangan masyarakat, karena merupakan pengembangan nilai-nilai dasar dalam karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Fukuyama, Francis., 2004. *State Building : Governance and Word Order in the 21st Century*.
- Haralambos dan Holborn, *Sosiology : Themes and Perspectives*, Collins Educational, London, 2000.
- Jakop Oetama (Pengantar), *Masyarakat Versus Negara : Paradigma Baru Membatasi Peran Negara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1999.
- Huntington, Samuel P, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2000.
- S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, CV Rajawali, Jakarta, 1992.
- Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- , *Demokratisasi dan Otonomi*, Kompas, Jakarta, 1999.